

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PB

PELUNCURAN DAN DISKUSI BUKU "TATANAN KELEMBAGAAN PB DI DAERAH"

PUJIONO CENTER, 3 JUNI 2017

RANIE AYU HAPSARI



Peran Serta Masyarakat

SFDRR:

➤ *Prioritas 1 (Memahami Risiko Bencana):*

Meningkatkan kerjasama di tingkat lokal dalam penyebaran informasi risiko bencana –keterlibatan LSM, OBM (organisasi berbasis masyarakat)

➤ *Prioritas 2 (Penguatan Tata Kelola Risiko Bencana untuk Mengelola Risiko Bencana):*

Membangun dan memperkuat forum koordinasi PRB;

➤ *Prioritas 3 (Investasi dalam PRB untuk Ketangguhan)*

Memperkuat investasi publik dan swasta yang tahan bencana;

➤ *Prioritas 4 (Kesiapsiagaan, Respon, Pemulihan, RR)*

Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem multi-ancaman yang berpusat pada masyarakat;

➤ UU NO. 24 TAHUN 2007

➤ Perka BNPB no. 11 Tahun 2014 (Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan PB)

(1) Pengambilan keputusan,

(2) Memberikan informasi yang benar kepada publik,

(3) Pengawasan,

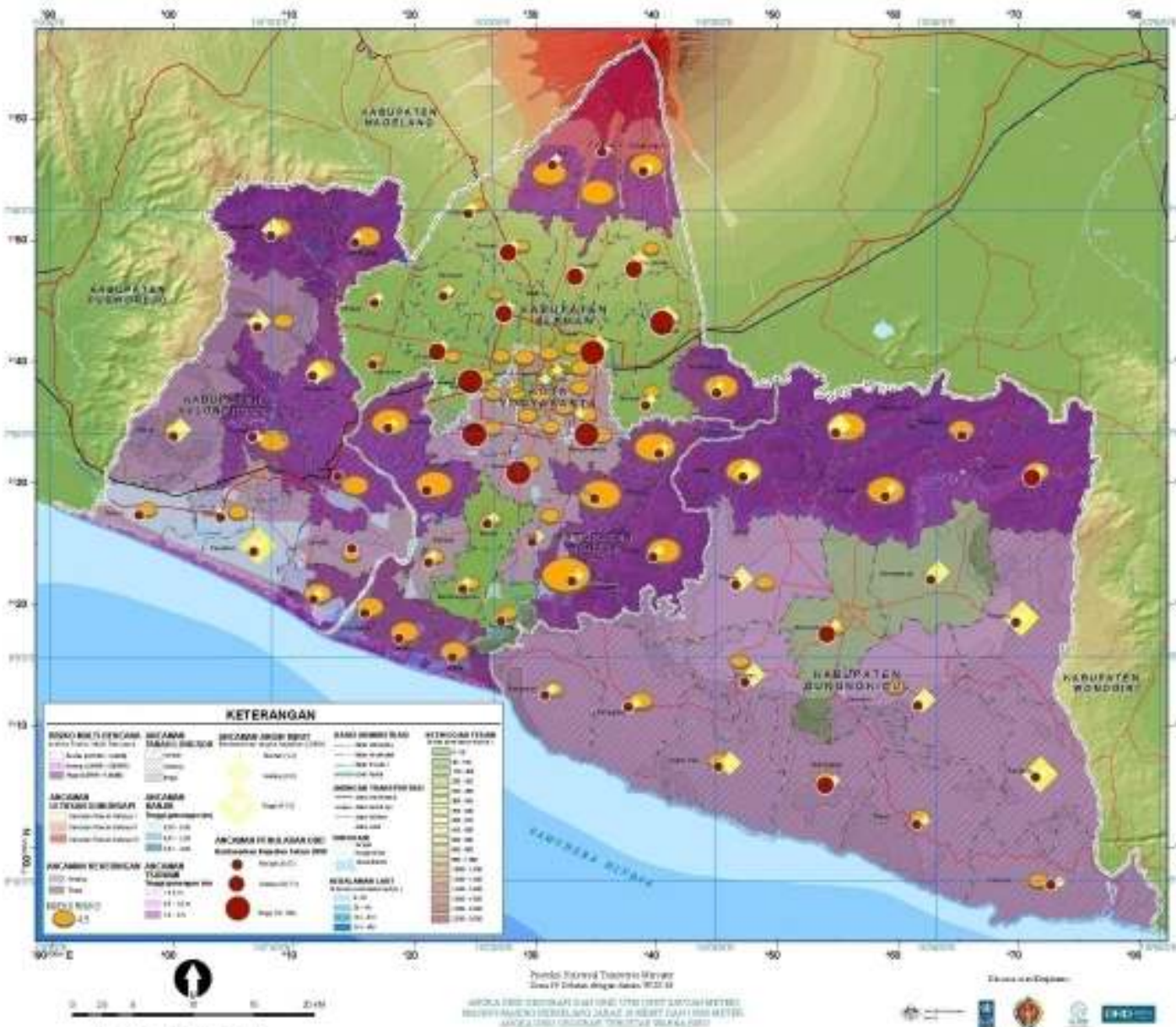
(4) Perencanaan,

(5) Impelementasi,

(6) Pemeliharaan program kegiatan PB.

**MENGAPA PERAN SERTA MASYARAKAT
MENJADI PENTING DAN PRIORITAS.....**

Multi-Disaster Risk Map of Yogyakarta



PETA RISIKO MULTI-BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Simpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti lokasi geografis yang strategis, topografi yang beragam, dan aktivitas manusia yang intens. Risiko bencana yang paling tinggi adalah gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Risiko bencana yang paling rendah adalah kebakaran hutan dan lahan.

Rekomendasi

Pada hasil penelitian ini, disarankan kepada pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang risiko bencana. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.

Daftar Pustaka

Agung, H. (2010). Analisis Risiko Bencana Daerah Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.



Daftar Pustaka (2)

Berbagai sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan peta risiko bencana ini, meliputi buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.



Daftar Pustaka (3)

Daftar pustaka tambahan yang mencakup sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Daftar Pustaka (4)

Daftar pustaka tambahan yang mencakup sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

NO	NAMA	JENJANG	NO	NAMA	JENJANG
1	Agung, H.	Magister	11	Sari, D.	S1
2	Berbagai	Journal	12	Sari, D.	S1
3	Berbagai	Journal	13	Sari, D.	S1
4	Berbagai	Journal	14	Sari, D.	S1
5	Berbagai	Journal	15	Sari, D.	S1

NO	NAMA	JENJANG	NO	NAMA	JENJANG
16	Berbagai	Journal	31	Berbagai	Journal
17	Berbagai	Journal	32	Berbagai	Journal
18	Berbagai	Journal	33	Berbagai	Journal
19	Berbagai	Journal	34	Berbagai	Journal
20	Berbagai	Journal	35	Berbagai	Journal

Skala: 1:100.000
 0 20 40 60 80 100 km

Yogyakarta, 10 Februari 2023
 Disusun dan Diagram
 Disusun dan Diagram



DATA IRBI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WILAYAH	RANKING	SKORE	KELAS RISIKO
DIY	12	165	TINGGI
KULONPROGO	48	203	TINGGI
BANTUL	82	187	TINGGI
GUNUNGKIDUL	234	158	TINGGI
SLEMAN	273	154	TINGGI
KOTA YOGYAKARTA	408	125	SEDANG
	496	250/45	

IRBI: Indeks Risiko Bencana Indonesia

JUMLAH KECAMATAN DAN DESA RAWAN BENCANA DI DIY

NO	KAB/KOTA	JML.KEC	JML.DESA/KEL
1	Bantul	17	69
2	Kulonprogo	11	75
3	Gunungkidul	18	124
4	Sleman	6	20
5	Kota Yogyakarta	7	13
	Jumlah	59 (dari 88 kec)	301 (dari 438 Desa)



Frekuensi Kejadian Bencana di DIY tahun 2012-2016

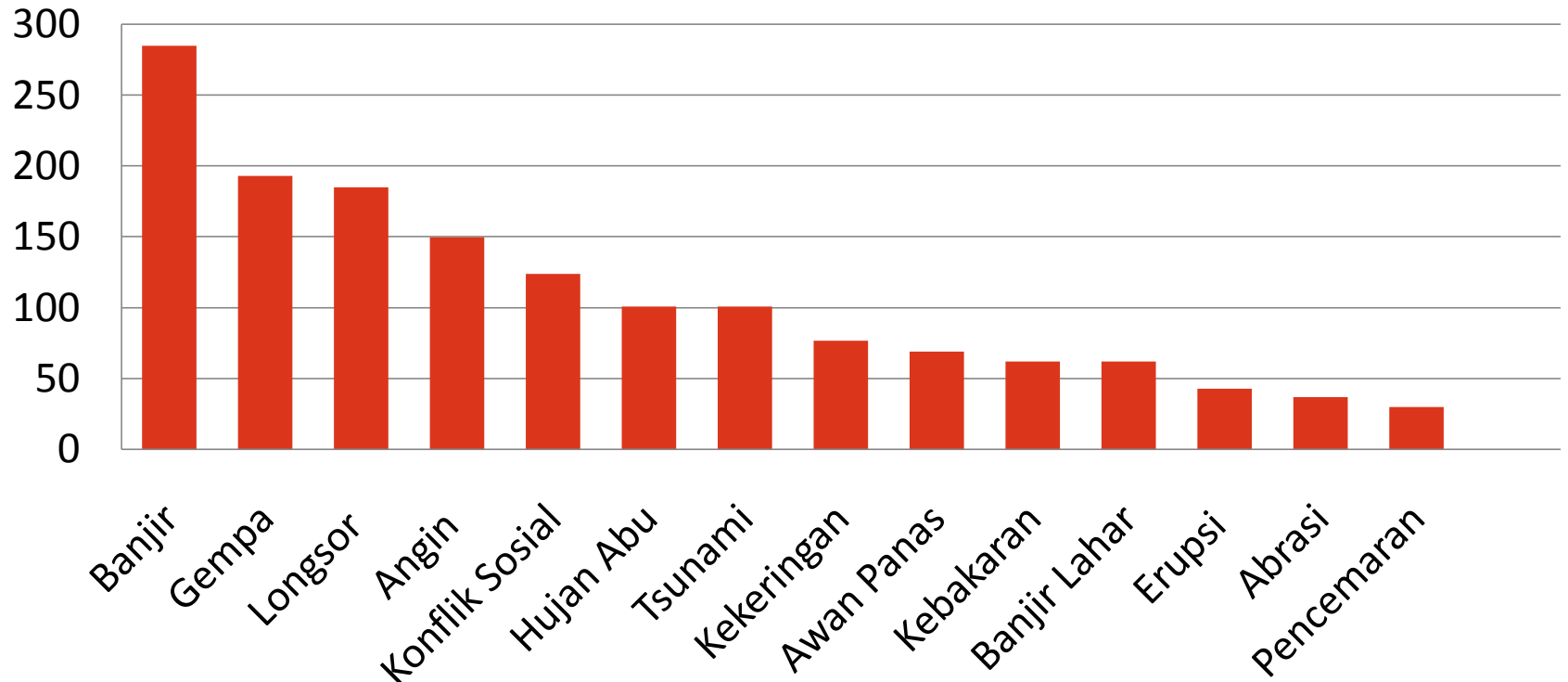
Jenis Bencana	Bantul					Gunungkidul					Kulon Progo					Sleman					Yogyakarta				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Banjir	40	2	0	1	1	17	0	0	0	4	0	0	0	0	2	8	6	2	0	3	2	7	0	0	2
Kekeringan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanah Longsor	14	12	1	3	7	84	18	7	5	18	216	1	1	3	25	8	3	1	2	12	0	1	2	0	8
Kebakaran Hutan/Lahan	1	8	5	4	17	16	0	3	1	18	6	3	0	2	11	8	2	4	7	34	2	5	2	7	29
Gempa Bumi	2	2	6	9	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Angin Kencang	127	89	61	1	21	133	34	1	2	27	25	3	0	3	30	84	56	18	9	40	2	4	1	3	12
Epidermi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gunung meletus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abrasi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



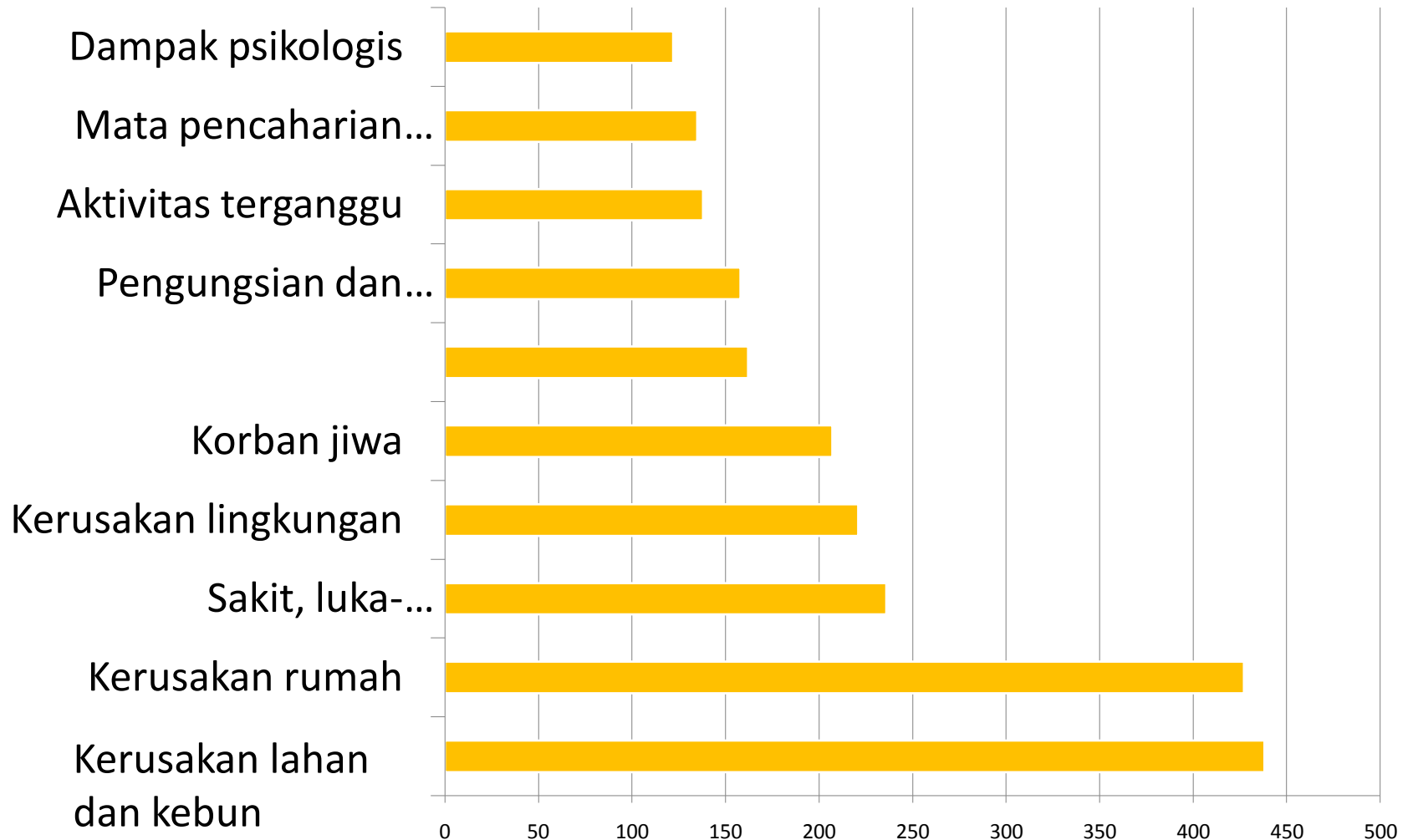
Pemahaman Risiko Bencana di Tingkat Lokal (Survey Frontline di 25 kabupaten)



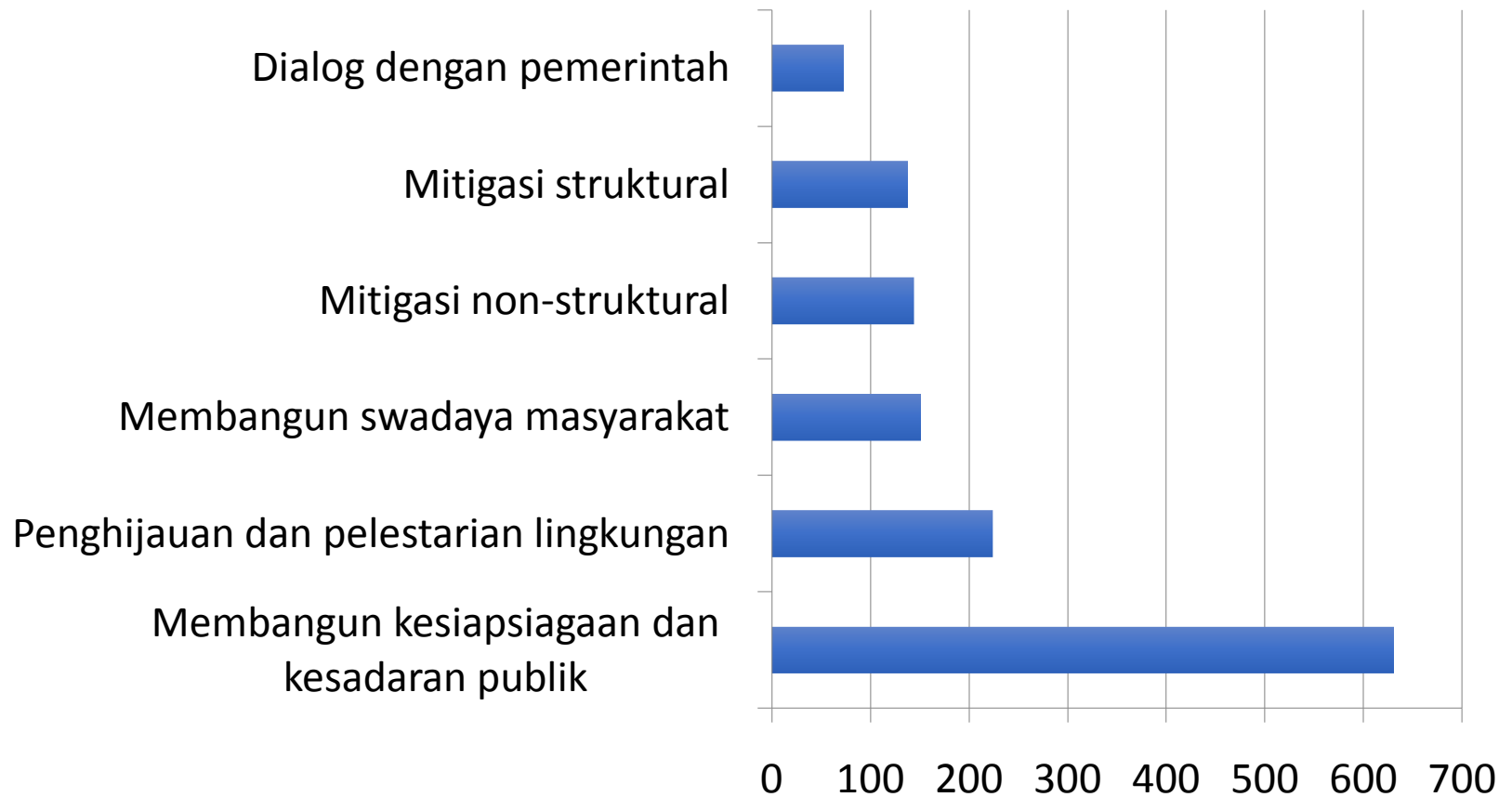
Ancaman yang Dihadapi



Konsekuensi dari Ancaman



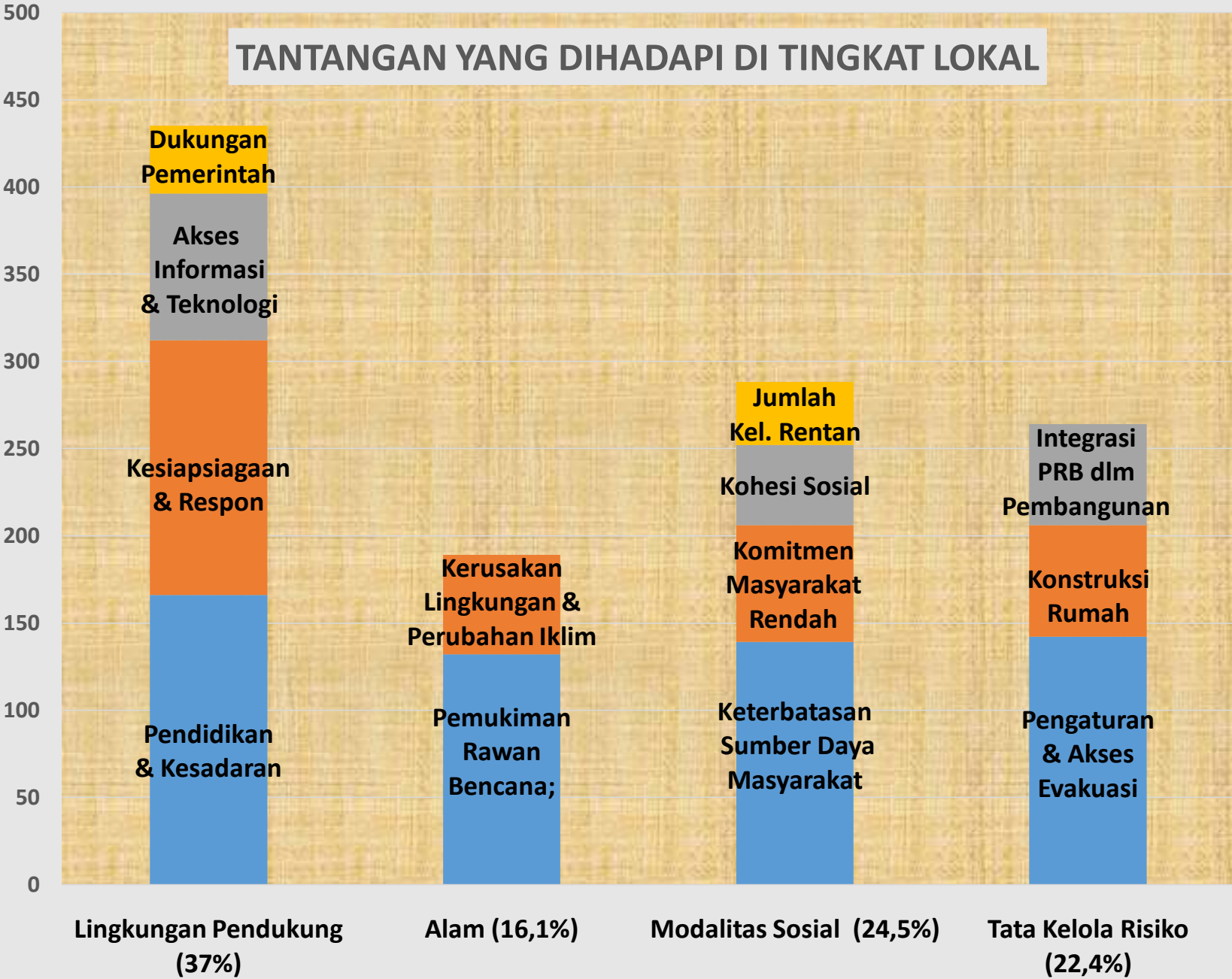
IDENTIFIKASI AKSI DITINGKAT LOKAL



PRAKTEK-PRAKTEK BAIK DI TINGKAT LOKAL



TANTANGAN YANG DIHADAPI DI TINGKAT LOKAL



Pembangunan yang Berisiko dan Tidak Berkelanjutan...



MENGAPA PERAN SERTA MASYARAKAT MENJADI PENTING DAN PRIORITAS.....

- Masyarakat sebagai garda depan
- Masyarakat memiliki perspektif lokal terhadap ancaman bencana
- Masyarakat memiliki sumberdaya

FORUM PRB adalah FORUM Multistakeholder Strategis



Rumah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk:

- Menyatukan berbagai pemangku kepentingan
- Koordinasi
- Kolaborasi

KEANGGOTAAN

Elemen-elemen pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, elemen-elemen yang termasuk di dalamnya adalah **lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, badan usaha dan media massa.**

VISI

“Menjadi komunitas Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki sistem sosial, ekonomi dan budaya yang tangguh terhadap bencana sebagai bagian dari upaya-upaya pengurangan risiko bencana di Negara Republik Indonesia ”

MISI

1. Mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung bagi pengembangan budaya pencegahan, melalui **advokasi dan penumbuhan kesadaran dan pengetahuan** tentang pengurangan risiko bencana.
2. Memfasilitasi **pengarusutamaan** pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan.
3. Menggunakan berbagai **perspektif dan aksi** yang bersifat **multi sektor dan multi disiplin ilmu**.
4. Menjadi **wadah kerjasama efektif multi-pihak** dan lintas bidang/ sektor dalam proses-proses pembangunan berkelanjutan
5. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengurangan risiko bencana melalui upaya yang **terpadu dan terkoordinasi dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, administrasi dan pengambilan keputusan pembangunan**.
6. **Memobilisasi sumber daya dan kapasitas** pemangku kepentingan lokal, lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional/ struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan.
7. Menjadi **center of excellence** dalam pengurangan risiko bencana.

FUNGSI

1. Sebagai mekanisme yang digunakan daerah untuk **pengembangan sistem** pengurangan risiko bencana.
2. Sebagai mekanisme untuk meningkatkan **kolaborasi dan koordinasi** berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas-aktivitas PRB.
3. Memastikan dan memperkuat **pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan**.
4. Sebagai **fasilitator** integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam regulasi, perencanaan dan program daerah di berbagai sektor pembangunan serta ke dalam kebijakan dan program bantuan pembangunan nasional maupun internasional.
5. Memastikan dan **memperkuat peran komunitas** dalam pengurangan dan pengelolaan risiko bencana.
6. Sebagai **katalisator untuk konsultasi daerah dan membangun konsensus** para pihak atau pemangku kepentingan.

MILESTONE FORUM PRB DIY

Pengurus Periode 2009-2013	Pengurus Periode 2013-2016	Pengurus Periode 2016-2019
Regulasi – regulasi PB dan pelebagaan	Mainstreaming PRB dalam perencanaan pembangunan dari semua sektor	Memastikan implementasi PRB kedalam regulasi dan agenda pembangunan yang tidak berisiko disemua sektor



Mandat Kongres III

1. Sinergi dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana di DIY dalam kerangka Sendai Framework Disaster Risk Reduction (SFDRR) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY.
2. Meneguhkan komitmen badan usaha dan media untuk terlibat aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana di DIY.
3. Kolaborasi, koordinasi dan kerjasama Forum PRB DIY dengan Forum PRB Kabupaten/ Kota dan Desa dalam peningkatan kapasitas serta advokasi kebijakan yang berpihak pada pengurangan risiko bencana.
4. Mendukung dan mendorong inisiatif dan praktek-praktek baik di tingkat lokal dalam upaya ketangguhan dalam mengatasi bencana-bencana berskala kecil tetapi intensitas sering serta adaptasi perubahan iklim.
5. Menjadi mitra yang strategis dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan dan memberikan masukan-masukan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan tidak berisiko.

6. Memformulasikan integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam aset-aset penghidupan (pendidikan, kesehatan, livelihood, infrastruktur, pelayanan publik, informasi, data, sumberdaya) ke dalam rencana pembangunan pemerintah daerah.
7. Memastikan inklusi sosial khususnya kelompok rentan yaitu masyarakat miskin, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas tanpa membatasi peran gender dalam memperoleh hak mereka untuk terlibat aktif dalam perencanaan, dan melakukan kontrol atas keputusan tentang prioritas pembangunan berperspektif PRB.
8. Kolaborasi, koordinasi dan kerjasama anggota Forum PRB dalam situasi tanggap darurat untuk bencana-bencana yang terjadi di DIY.
9. Meningkatkan keaktifan lembaga-lembaga anggota dalam bersinergi kerja-kerja pengurangan risiko bencana.
10. Meningkatkan akuntabilitas kinerja forum PRB DIY baik dalam struktur, kebijakan, perencanaan dan implementasi program, serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja.

CAPAIAN 2009 - KINI

Bid. Advokasi, Regulasi dan Kebijakan

1. Advokasi Perda PB DIY no. 8 th 2010
2. Advokasi pembentukan BPBD dan perda no. 10 thn 2010
ttg Organisasi dan Tata Kerja BPBD
3. Advokasi RPJMD 2009 – 2013 yg memuat ketentuan ttg
PB
4. Advokasi dalam renaksi Merapi 2011 – 2013
5. Penyusunan peraturan gubernur DIY
6. Penyusunan RAD DIY
7. Penyusunan panduan pengintegrasian komitmen global ke
dalam perencanaan pembangunan di DIY

Bid. Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan Pengetahuan

1. Penyusunan direktori PRB DIY
2. Silabus dan modul “Pengarusutamaan PRB dalam Pembangunan”
3. Diskusi pengarusutamaan PRB dalam pembangunan
4. Pelatihan HRNA dan PDNA
5. Layang PRB
6. Survey longitudinal study
7. Penyusunan Buku Refleksi Gempa 2006
8. Survey pencapaian HFA di tingkat lokal
9. SOP kedaruratan untuk erupsi merapi

Bid. Partisipasi dan Pelembagaan

1. Fasilitasi pembentukan forum PRB di desa
2. Penyampaian edukasi, informasi PRB melalui media
3. Keikutsertaan dalam peringatan bulan PRB (kampanye, komunike), KN PRBBK
4. Menjadi mitra BNPB dalam pelaksanaan AMCDRR 2012 di Yogyakarta

Bid. Pengembangan Organisasi

1. Penyusunan SOP untuk pengembangan organisasi
2. Mekanisme kerjasama/ kemitraan dengan pihak lain
3. Terlaksananya Kongres Forum PRB
4. Pertemuan internal forum secara periodik

REFLEKSI KETANGGUHAN

1. Pendekatan PRB berpusat pada warga

- Langkah riil, menguatkan kapasitas lokal, scaling up
- Keragaman kebutuhan dan kapasitas
- Perempuan & difabel sebagai aktor kunci PRB

2. Investasi PRB dalam pembangunan

- Aman sebagai hak warganegara, peningkatan kapasitas
- Upaya struktural dan non-struktural, kombinasi pengetahuan lokal dan pemanfaatan teknologi
- Integrasi dalam perencanaan pembangunan
- Peralihan konsentrasi: Dari respon darurat ke pengurangan risiko (dunia usaha)

3. Desa sebagai simpul kunci

- Indikator ketangguhan komunitas/ desa sebagai rujukan bersama
- Peluang dengan UU Desa, lintas pihak

4. Koordinasi lintas sektor

- PRB sebagai urusan semua pihak (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media)
- Lintas sektor: peran fasilitasi & koordinasi termasuk koordinasi lintas wilayah/ daerah
- Komitmen politik & kelembagaan

5. Sinergi global – nasional – lokal

- Pengetahuan dan praktik lokal, dan
- Kerangka serta rujukan global

TERIMA KASIH

SEKRETARIAT

Website : www.prbdiy.net

Email : forumprb@gmail.com

Alamat S: Komplek Kantor BPBD DIY
(Lantai I Sayap Timur)
Jl Kenari No.14A Yogyakarta